

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan warga Negara. Upaya pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah yang terdaftar. Upaya yang paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar.<sup>1</sup> Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui program bantuan operasional sekolah(BOS). Program dana BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan

---

<sup>1</sup> Syukarman ‘*Sosiologi pendidikan memahami pendidikan dari aspek Multikulturalisme*’ (februari,2020).hlm 212

dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.<sup>2</sup>

Salah satu yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adanya peran Negara dalam sarana pendidikan, dan pendidikan dan tenaga pendidikan. lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan, belum memadainya tempat pendidikan,perlengkapan,alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerja sama antara berbagai lembaga masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relative mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Menurut PP 48 Tahun tentang pendanaan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transformasi,konsumsi, pajak, asuransi. Dengan demikian, program dana bantuan operasional sekolah dapat menekankan biaya pendidikan yang terjangkau bermutu.<sup>3</sup>

Selain itu kebijakan tersebut membahas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan layanan gratis dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk

---

<sup>2</sup> Masyita ‘‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus DI SD NOMOR 41 Birue kabupaten baru)’’ (Meraja Journal Vol. 2, No 2, Juni2019. Hal. 186

<sup>3</sup> Kemendiknas, *Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015*, (Jakarta : Dekkibud, 2014 Hal. 2

memberikan dana bantuan operasional sekolah(BOS) yang di tujukan bagi semua sekolah baik itu sekolah swasta maupun negeri (SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK) dan semua jenis kelompok yang rata, baik kelompok daerah yang berdomisili di daerah terpencil, masyarakat miskin, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dana BOS adalah dana lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah. Untuk mendukung program dana BOS, maka pemerintah menerbitkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan beberapa prinsip salah satunya akuntabilitas, sesuai dengan yang ingin diteliti. Adapun prinsip akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasional nonpersonalia pada pasal 1 menjelaskan bahwa standar biaya operasional nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan selama 1 tahun periode yang bertujuan agar satuan pendidikan dapat berjalan dengan teratur dan berkelanjutan sesuai dengan aturan standar pendidikan nasional. BOS menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional sekolah dan dalam kehidupan masyarakat karena dapat mengurangi beban masyarakat.

---

<sup>4</sup> Peraturan menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Hal 6

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui dana bantuan operasional sekolah sangatlah penting dalam suatu pelaksanaan dalam setiap proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan.

Akuntabilitas adalah keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain atas kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang dipertanggung jawabkannya menurut rencana yang telah ditetapkan. Selain itu tujuan Akuntabilitas adalah untuk menilai kepuasan public terhadap kinerja sekolah di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah.<sup>5</sup>

Menurut petunjuk teknis (juknis), dana BOS merupakan program Negara yang tujuannya pada hakekatnya untuk membiayai biaya operasional materi satuan

---

<sup>5</sup> Sulfiati F, Andi Samsu Alam, Andi Lukman Irwan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai", Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 2, Juli 2010 (11 3-122) ISSN 1979-5645

pendidikan dasar sebagai pengembang program wajib belajar. Program dana BOS dapat membantu dan mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan minimal SMA. Selain itu, pemerintah juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pasal 4 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Besar harapan program dana BOS dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan program dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang tertulis dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS). Berdasarkan petunjuk teknik (Juknis), pengelolaan dana BOS juga melibatkan kerja sama berbagai tim, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Juknis ini memberikan kemudahan bagi sekolah untuk di gunakan sebagai dasar dalam proses pelaksanaan program dana BOS agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan peraturan lainnya sehingga pengelolaan dana BOS dapat di katakana efektif.

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan Dana BOS juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program Dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, agar pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan efektif.<sup>6</sup> Untuk mengukur efektivitas dalam penyediaan pengelolaan Dana BOS dapat dilihat dari kesesuaian antara

---

<sup>6</sup> Farida soamole, “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswadi Sd Negeri 11 Abeli Kel. Tobimeitakec. Abeli Kota Kendari” Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Kediri, 2017. Hal 3

pelaksanaan dengan rencana penggunaan Dana BOS, kesesuaian jumlah Dana BOS dengan jumlah siswa dalam madrasah, dan keseimbangan antara sasaran, program dan tujuan (puntong). Dengan demikian, jika ketiga indikator ini dapat dijalankan dengan baik, maka sudah semestinya menjadi salah satunya yang dapat mendukung program Dana BOS.

Dana BOS yang di gunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah karena dengan dana BOS, menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah berdasarkan sistem pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan masing-masing sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>7</sup>

Dana BOS di berikan kepada sekolah-sekolah baik yang di kelolah oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah yaitu kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, pembayaran gaji guru dan karyawan, serta keperluan lainnya seperti air, listrik, dan perawatan gedung sekolah.

Aturan dana BOS yaitu adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen yaitu adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat di perlukan

---

<sup>7</sup> Sistem Pendidikan Nasional'. In *Undang-Undang No 20 Tahun 2003, 2003*.

dalam rangka peningkatan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan sekolah.<sup>8</sup> Di samping itu transparansi dapat meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Hasyim Asy'Ary Ambon belum berjalan dengan baik. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sekolah di tandai dengan tidak di publikasi terkait dana bos kepada orang tua wali siswa pada MTs Hasim Asy'Ari Ambon. Hal tersebut menggambarkan masi rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua wali murid dalam pengelolaan keuangan sekolah pada MTs Hasyim Asy'Ari ambon. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) pada MTS Hasyim Asy Ary' Ambon maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Mts Hasim Asy'ary Ambon”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimaimana pengelolaan anggaran dana BOS Pada MTs Hasyim Asy'Ari Ambon?

---

<sup>8</sup> Jurnal administrasi, kebijakan, dan kepemimpinan pendidikan (JAK2P), Vol 3 No 1 Juni 2022

2. Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di MTs Hasyim Asy'Ari Ambon?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Hasyim Asy'Ari Ambon.
2. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transpaansi pelaporan pertanggung jawaban di MTs Hasyim Asy'Ari Ambon.

### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pe nelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Analisis adalah mengamati aktifitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponenya untuk di kaji atau dipelajari secara detail.
2. Pengertian pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan di gunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu.
3. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan yang di ukur dalam suatu uang yang di susun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

4. Pengertian dana bos adalah program yang di susung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.
5. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang di laksanakan secara periodik.
6. Transparasi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang yang di ambil pemerintah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu ekonomi dalam kajian teoretis bagi akademisi terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah di MTs Hasyim Asy'ari Ambon.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Sekolah Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengelolaan keuangan sekolah sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan sesuai dengan keadaan keuangan sekolah.
  - b. Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan pertanggung jawaban keuangan sekolah.